

**SKRIPSI**

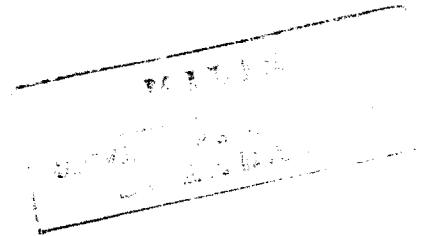
**CITRA PUTERI KUSWARDANI**

**PENGUNAAN BAHAN YANG TIDAK HALAL  
DALAM PROSES PRODUKSI PANGAN YANG MENCANTUMKAN  
LABEL HALAL PADA KEMASANNYA DITINJAU DARI  
KUHP DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
( ANALISIS YURIDIS KASUS AJINOMOTO )**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

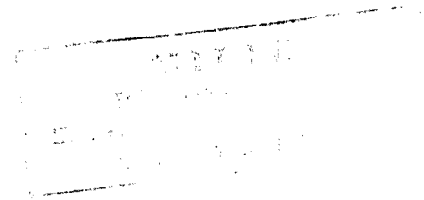
KK  
Pid 19/02  
Kus  
P



**PENGUNAAN BAHAN YANG TIDAK HALAL  
DALAM PROSES PRODUKSI PANGAN YANG MENCANTUMKAN  
LABEL HALAL PADA KEMASANNYA DITINJAU DARI  
KUHP DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
( ANALISIS YURIDIS KASUS AJINOMOTO )**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**



**Dosen Pembimbing**

**Penyusun**

**H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S**  
**NIP. 130 368 696**

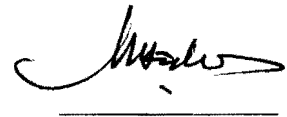
**Citra Putri Kuswardani**  
**NIM 039714598**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

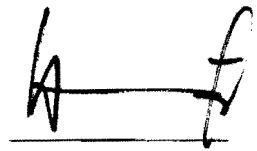
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2002**

**Panitia Penguji Skripsi :**

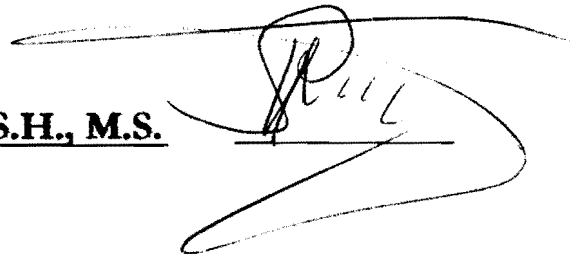
**Ketua : Much, Zaidun, S.H., M.Si.**



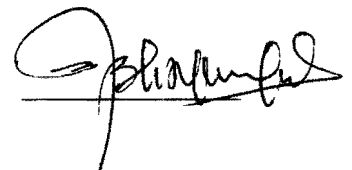
**Anggota : 1. H. Harjono Mintaroem , S.H., M.S.**



**2. Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.**



**3. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.H.**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

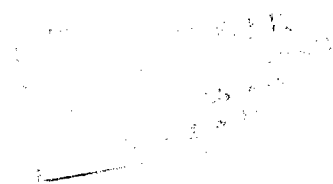
#### **1. Kesimpulan**

- a. Penggunaan bahan tidak halal dalam proses produksi pangan yang mencantumkan label “halal” dalam kemasannya merupakan perbuatan pidana, sebab dengan mencantumkan keterangan halal pada kemasan pangan, maka dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud, dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenarannya. Oleh karena itu PT. AJINOMOTO INDONESIA seharusnya dapat dikenai ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bukan Pasal 386 KUHP karena akan sulit untuk membuktikan unsur palsu dari MSG hasil produksi PT. AJINOMOTO INDONESIA tersebut.

Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal yang dicantumkan, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut kepada lembaga keagamaan yang berwenang, dalam hal ini adalah LPPOM MUI. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan ketentraman dan keyakinan kepada umat Islam bahwa pangan yang dikonsumsi memang aman dari segi agama. Namun, sampai saat ini belum ada kewajiban untuk memiliki sertifikat halal bagi para produsen pangan yang memperdagangkan hasil produksinya maupun yang memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia.

b. Permasalahan dalam kasus AJINOMOTO ini terletak pada penggunaan *bactosoytone* dalam salah satu tahap produksi pembuatan MSG, yang seharusnya perbuatan tersebut dapat dikenai ancaman pidana karena telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun karena ada beberapa pertimbangan hukum yang menyebabkan dihentikannya penyidikan terhadap kasus ini yaitu tidak terdapat cukup bukti dan tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan.

Padahal semestinya PT. AJINOMOTO INDONESIA bisa dijatuhi pidana agar mereka jera atas perbuatannya, selain itu, juga sebagai peringatan untuk para produsen makanan lainnya agar mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan bahan-bahan untuk memproduksi pangan. Namun penjatuhan pidana tersebut bukan berupa pidana penjara, apalagi sampai menutup pabrik PT. AJINOMOTO INDONESIA, mengingat jumlah karyawannya yang begitu banyak, tetapi lebih cenderung pada penjatuhan pidana denda dengan mempertimbangkan itikad baik dari PT. AJINOMOTO INDONESIA yang mau meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia atas kelalaian mereka dan tidak menggunakan kembali bahan yang dipermasalahkan tersebut.



## **2. Saran**

a. Keterangan tentang kehalalan pangan mempunyai arti yang sangat penting karena selain melindungi masyarakat muslim agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal, masyarakat non muslim juga ikut

terlindungi karena dengan adanya sertifikasi halal berarti pangan tersebut sudah pasti terjamin dari segi gizi maupun segi kehygienisannya. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila sertifikasi halal diwajibkan bagi produk-produk yang sering dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Konsumen tidak mengetahui seluk-beluk pembuatan pangan yang dilakukan oleh produsen.